



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
2025**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	7
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Cascading dan Struktur Organisasi Dasar Pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	11
1.2 Aspek Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	12
1.2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	12
1.2.2 Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.....	13
1.3 Dukungan Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	15
1.3.1 Sumber Daya Manusia.....	15
1.3.2 Sarana Prasarana/ BMD	17
1.3.3 Anggaran	20
1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025	21
1.5 Dasar Hukum.....	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	26
2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	27
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	28
2.4 Struktur Program dan Kegiatan 2025	29
2.5 Perjanjian Kinerja.....	34
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	40

3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya serta Target Jangka Menengah pada Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	59
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Nasional/ Provinsi dan Kabupaten Sekitar.....	64
3.4	Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Terhadap Capaian Sasaran Pemda	66
3.5	Realisasi Anggaran	67
3.6	Analisis Efisiensi Anggaran.....	69
3.7	Lintas Sektor	72
BAB IV	PENUTUP.....	74
4.1	Kesimpulan	74
4.2	Langkah Perbaiki Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 1. 2	Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan.....	15
Tabel 1. 3	Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan.....	15
Tabel 1. 4	Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.....	18
Tabel 1. 5	Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	21
Tabel 1. 6	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2024	21
Tabel 2. 1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.....	27
Tabel 2. 2	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.....	28
Tabel 2. 3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan.....	28
Tabel 2. 4	Struktur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang Berkontribusi Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025.....	30
Tabel 2. 5	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabuptaen Rembang Tahun 2025	34
Tabel 2. 6	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Perhubungan Kabuptaen Rembang Tahun 2025	35
Tabel 3. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	40
Tabel 3. 2	Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	40
Tabel 3. 3	Rumus Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan	41
Tabel 3. 4	Rumusan Indikator Sasaran 1 dan Formulasi Perhitungan	42

Tabel 3. 5	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Teknis	43
Tabel 3. 6	Rumusan Indikator Sasaran 2 dan Formulasi Perhitungan	45
Tabel 3. 7	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Teknis	46
Tabel 3. 8	Rumusan Indikator Sasaran 3 dan Formulasi Perhitungan	50
Tabel 3. 9	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Teknis	51
Tabel 3. 10	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	55
Tabel 3. 11	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024	60
Tabel 3. 12	Perbandingan Realisasai Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Nasional/ Provinsis dan Kabupaten Sekitar .	64
Tabel 3. 13	Kontribusi Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Terhadap Sasaran Pemda.....	67
Tabel 3. 14	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	68
Tabel 3. 15	Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025	69
Tabel 3. 16	Inventarisasi Lintas Sektor	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Cascading Kinerja Dinas Perhubungan.....	11
Gambar 1. 2	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	12
Gambar 1. 3	Peta Jabatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	17
Gambar 2. 1	Website Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	35
Gambar 2. 2	Instagram Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	36
Gambar 2. 3	Instagram Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	36
Gambar 2. 4	TikTok Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.	37
Gambar 2. 5	Call Center Pengaduan Fasilitas Lalu Lintas.....	37
Gambar 2. 6	SiRAJA Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	38
Gambar 2. 7	Call Center Si Handal.....	39
Gambar 3. 1	Dokumentasi Pemasangan CCTV.....	44
Gambar 3. 2	Dokumentasi Monitoring Pemasangan LPJU.....	45
Gambar 3. 3	Dokumentasi Pemeliharaan Alat Uji	49
Gambar 3. 4	Dokumentasi Monitoring dan Pengawasan	49
Gambar 3. 5	Dokumentasi Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Terminal.....	49
Gambar 3. 6	Dokumentasi Evaluasi Jaringan Trayek dan Kebutuhan Angdes	50
Gambar 3. 7	Dokumentasi Pemberangkatan Bus Mudik Gratis.	50
Gambar 3. 8	Dokumentasi Posko Lebaran	54
Gambar 3. 9	Dokumentasi Penindakan Aduan Parkir Liar	54
Gambar 3. 10	Dokumentasi Pengaturan Lalu Lintas.....	55
Gambar 3. 11	Dokumentasi Giat Patroli Malam	55

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, sekaligus menunjukkan komitmen organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil (*output dan outcome*).

Selain itu, LKjIP memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat keberhasilan pencapaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah solusi yang ditempuh selama pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. Melalui laporan ini juga dapat diukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program berdasarkan Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta RENJA Tahun 2025, dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Rembang.

Rembang, 25 Februari 2026



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG

NURPURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19730401 199303 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Perangkat Daerah menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berikut adalah capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025:

1. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur”
 - Diukur dengan indikator Indeks Konektivitas, dengan formulasi (bobot × Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan) + (bobot × Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (bobot × Indeks Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas).
 - Capaian Indikator didukung oleh program “Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)”.
 - Target Capaian Indikator Sasaran tahun 2025 sebesar 62,25% terealisasi sebesar 79,48%. Maka capaiannya sebesar 127,68% dengan kategori Sangat Baik.
 - Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi Indeks Konektivitas Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar. %tase capaian kinerja juga meningkat menjadi 127,68% pada Tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan infrastruktur transportasi di Kabupaten Rembang mengalami perkembangan yang semakin baik dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.
2. Capaian sasaran strategis “Terjaminnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan”
 - Diukur dengan indikator Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan, dengan formulasi (bobot x %tase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota).
 - Capaian Indikator didukung oleh program “Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)”.

- Target Capaian Indikator Sasaran tahun 2025 sebesar 85,71% terealisasi sebesar 100%. Maka capaiannya sebesar 116,67% dengan kategori Sangat Baik.
 - Dibandingkan dengan tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang konsisten dalam pemenuhan target. Pada tahun 2024, ditetapkan target sebesar 57,14% dengan realisasi mencapai 85,71% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 150%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melampaui target yang ditetapkan secara signifikan. Meskipun %tase capaian tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024, hal tersebut terjadi karena target yang ditetapkan pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Secara substantif, kinerja tahun 2025 tetap menunjukkan tren positif karena realisasi indeks terus meningkat dan berhasil melampaui target, yang mengindikasikan peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan secara berkelanjutan.
3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kenyamanan dan Keandalan Angkutan”
- Diukur dengan Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan formulasi (bobot x %tase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan) + (bobot x %tase Kendaraan Laik Jalan) + (bobot x Terminal dan Perparkiran yang Terkelola).
 - Capaian Indikator didukung oleh program “Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)”.
 - Target Capaian Indikator Sasaran tahun 2025 sebesar 63,21% terealisasi sebesar 82,19%. Maka capaiannya sebesar 130,02% dengan kategori Sangat Baik.
 - Perbandingan Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan tren kinerja yang semakin membaik. Pada tahun 2024, target indeks ditetapkan sebesar 47,17 dengan realisasi mencapai 50,82 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 107,74%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target yang direncanakan. Dibandingkan tahun 2024, baik

dari sisi target maupun realisasi mengalami kenaikan, serta %tase capaian juga lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan angkutan yang lebih optimal, sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung sasaran strategis Perangkat Daerah di bidang pelayanan transportasi.

4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Lalu Lintas yang Berkeselamatan”

- Diukur dengan Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas, dengan formulasi (bobot x %tase Lalulintas Berkeselamatan) + (bobot x %tase Jumlah Manajemen Rekayasa Lalulintas yang Terlaksana) + (bobot x %tase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ).
- Capaian Indikator didukung oleh program “Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)”.
- Target Capaian Indikator Sasaran tahun 2025 sebesar 38,48% terealisasi sebesar 57,09%. Maka capaiannya sebesar 148,36% dengan kategori Sangat Baik.
- Perbandingan Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya lonjakan kinerja yang sangat signifikan pada tahun 2025. Pada tahun 2024, target indeks ditetapkan sebesar 36,30 dengan realisasi sebesar 30,80 sehingga capaian kinerja hanya mencapai 84,85%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belum memenuhi target yang direncanakan. Sebaliknya, pada tahun 2025 target meningkat menjadi 38,48 dan realisasi melonjak hingga 57,09, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 148,36%. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang sangat signifikan baik dari sisi realisasi maupun %tase capaian.

Meskipun capaian sasaran strategis Perangkat Daerah menunjukkan hasil yang positif dan sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian:

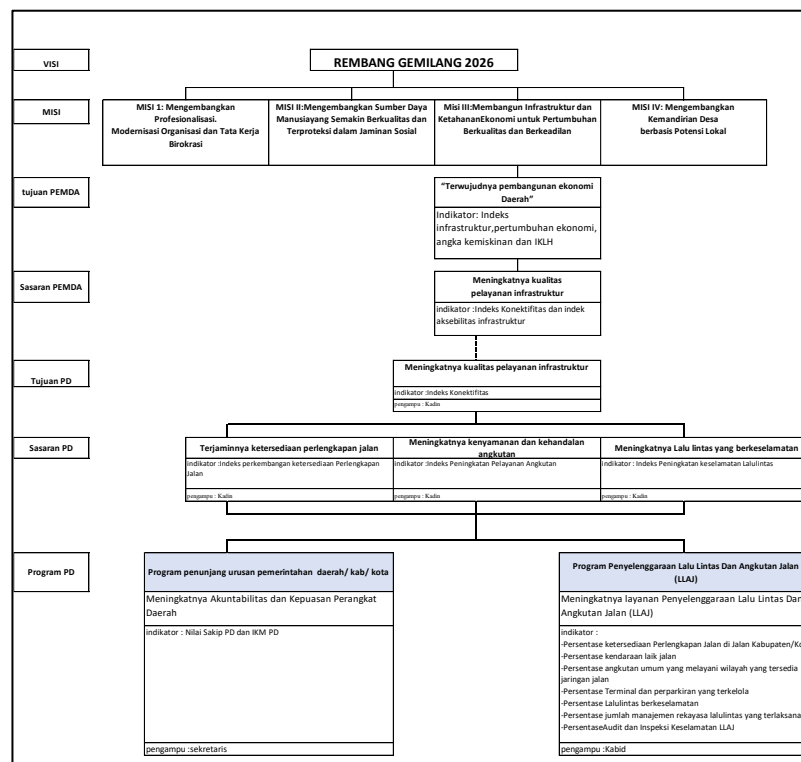
1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja;
2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Perlunya peningkatan jumlah maupun kualitas SDM sesuai dengan keahlian di bidang perhubungan;
4. Perlunya optimalisasi pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan;
5. Perlunya peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
6. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum dan sistem transportasi;
7. Perlunya penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor;
8. Perlunya optimalisasi pemanfaatan data dan digitalisasi layanan perhubungan;
9. Perlunya peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian operasional di lapangan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Cascading dan Struktur Organisasi Dasar Pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Rembang, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dibentuk dengan skema kerja sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Cascading Kinerja Dinas Perhubungan



Berikut ini penjabaran untuk memperjelas kedudukan dan susunan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi:
 - Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Lalu Lintas , yang membawahi :
 - Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - d. Bidang Teknik Kendaraan dan Angkutan yang membawahi:
 - Seksi Pengujian;
 - Seksi Angkutan;
 - e. Bidang Prasarana, yang membawahi:
 - Seksi Pembangunan Prasarana dan;
 - Seksi Pemeliharaan Prasarana;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang



Sumber : Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

1.2 Aspek Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

1.2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. Dinas Perhubungan

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariat Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2.2 Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Dalam tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang telah menghadapi berbagai macam permasalahan, baik yang dapat diselesaikan maupun yang masih dihadapi hingga saat ini. Permasalahan tersebut mencakup aspek internal dan eksternal yang secara langsung mempengaruhi kinerja layanan transportasi dan konektivitas wilayah di Kabupaten Rembang.

Dari sisi internal, permasalahan yang dihadapi antara lain terbatasnya sumber daya manusia (SDM) perhubungan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang sesuai dengan keahlian di bidang perhubungan. Selain itu, alokasi anggaran yang tersedia belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan peningkatan dan pemeliharaan perlengkapan jalan serta fasilitas transportasi. Pengelolaan terminal tipe C dan fasilitas parkir masih memerlukan peningkatan dari sisi sarana, manajemen, dan pengawasan. Belum adanya sistem

pemantauan lalu lintas secara otomatis juga menjadi kendala dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Ketersediaan angkutan perdesaan serta penyediaan transportasi bagi masyarakat secara umum belum optimal, ditambah dengan masih kurangnya pengembangan teknologi dan kemitraan di bidang perhubungan. Di sisi sarana prasarana, masih terdapat kekurangan dan kebutuhan rehabilitasi perlengkapan jalan seperti rambu, marka, LPJU, dan *guardrail*. Selain itu, masih diperlukan penyempurnaan konsistensi indikator kinerja, dokumentasi monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi dalam perencanaan berikutnya.

Sementara itu, dari sisi eksternal, permasalahan yang dihadapi meliputi kondisi kendaraan angkutan umum yang sebagian telah berusia tua dan tidak laik jalan sehingga berpotensi menurunkan tingkat keselamatan. Maraknya angkutan tidak resmi seperti kendaraan plat hitam, bentor, dan tosa juga berdampak pada ketidaktertiban lalu lintas dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pengembangan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas seperti LPJU, *Traffic Light* (TL), dan *Warning Light* (WL) pada jalan provinsi maupun nasional masih terkendala kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Kabupaten Rembang juga belum memiliki jalan lingkar, sehingga seluruh arus kendaraan, termasuk kendaraan berat dan logistik, bertumpu pada satu ruas jalan utama yaitu jalur Pantura yang merupakan jalur strategis Pantai Utara Jawa, khususnya di dalam kota Kabupaten Rembang. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya aktivitas tambang galian C dan pabrik pengolahan hasil tambang berskala besar yang menyebabkan tingginya kepadatan lalu lintas.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi isu strategis yang harus ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan arah kebijakan

pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, khususnya pada Misi 4 yang menekankan penguatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah dengan sasaran “Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur konektivitas wilayah”.

1.3 Dukungan Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang secara optimal adalah sebanyak 99 orang dengan rincian:

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SD Sederajat	0	0	2	0	2
2	SMP Sederajat	1	0	0	0	1
3	SMA Sederajat	20	1	16	4	41
4	D2	1	0	0	0	1
5	D3	10	3	2	1	16
6	S1	13	3	11	6	33
7	S2	4	0	0	0	1
8	S3	0	0	0	0	0
Jumlah		49	7	31	11	98

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang 2025

Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	2	0	2
2	Golongan II	14	4	17
3	Golongan III	32	3	36
4	Golongan IV	3	0	3
5	Golongan V	16	5	21
6	Golongan VI	2	0	2
7	Golongan IX	11	6	17
Jumlah		80	18	98

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang 2025

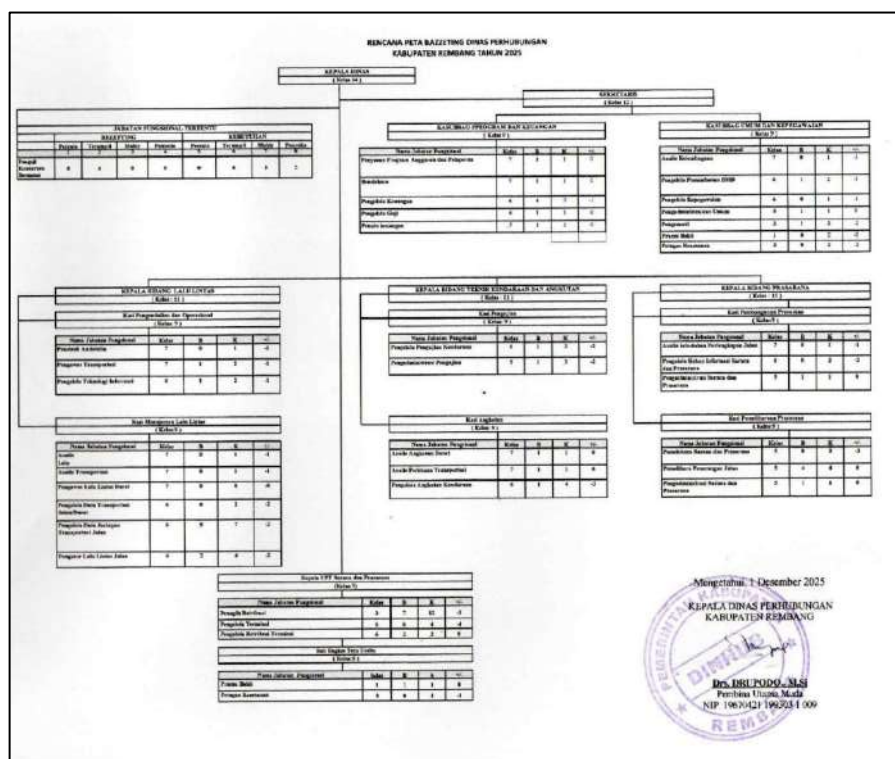
Tabel 1. 3 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	%tase terhadap Pegawai ASN (%)
1	2	3	4	5
A	Jabatan Struktural		15	15,31
1	Eselon II	14	1	1,02
2	Eselon III	12	1	1,02
3	Eselon III	11	3	3,06
4	Eselon IV	9	9	9,18

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	%tase terhadap Pegawai ASN (%)
1	2	3	4	5
5	Eselon V	8	1	1,02
B	Jabatan Fungsional tertentu		7	7,14
	- Analis Kebijakan	8	1	1,02
	- Arsiparis Ahli Pertama	6	1	1,02
	- Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	6	5	5,10
C	Jabatan Fungsional umum		76	77,55
	- Penata Keuangan	7	1	1,02
	- Analis Angkutan Jalan/Darat	7	0	0,00
	- Analis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	7	0	0,00
	- Analis Kelembagaan	7	1	1,02
	- Analis Lalu Lintas	7	0	0,00
	- Analis Perizinan Transportasi	7	1	1,02
	- Analis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat	7	0	0,00
	- Analis Transportasi	7	0	0,00
	- Bendahara	7	1	1,02
	- Operator Layanan Operasional		12	12,24
	- Pemelihara Penerangan Jalan	5	3	3,06
	- Penagih Retribusi	3	3	3,06
	- Penata Layanan Operasional		16	16,33
	- Penelaah Kemitraan Keselamatan Transportasi Jalan	7	0	0,00
	- Pengadministrasi Pengujian	5	1	1,02
	- Pengadministrasi Perkantoran		8	8,16
	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1	1,02
	- Pengadministrasi Umum	5	1	1,02
	- Pengatur Lalu Lintas	6	1	1,02
	- Pengawas Keselamatan Angkutan	7	0	0,00
	- Pengawas Lalu Lintas Darat	7	1	1,02
	- Pengawas Transportasi	7	3	3,06
	- Pengelola Angkutan Kendaraan	6	1	1,02
	- Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	6	3	3,06
	- Pengelola Data Transportasi Darat	6	0	0,00
	- Pengelola Gaji	6	1	1,02
	- Pengelola Kepegawaian	6	0	0,00
	- Pengelola Keuangan	6	2	2,04
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1	1,02
	- Pengelola Pengujian Kendaraan	6	0	0,00
	- Pengelola Perizinan Angkutan Barang	6	0	0,00
	- Pengelola Perizinan Angkutan Penumpang dalam Trayek	6	0	0,00
	- Pengelola Retribusi Terminal	6	2	2,04
	- Pengelola Teknologi Informasi	6	0	0,00
	- Pengelola Terminal	6	2	2,04
	- Pengemudi	3	1	1,02
	- Penyusun Program dan Anggaran	7	1	1,02
	- Petugas Keamanan	1	0	0,00
	- Petugas Transportasi Darat		5	5,10
	- Pengelola Umum Operasional	1	2	2,04
	- Pramubakti	1	1	1,02
	Jumlah		98	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang 2025

Gambar 1. 3 Peta Jabatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang 2025

Berdasarkan Peta Jabatan Dinas Perhubungan tahun 2025 menunjukkan bahwa Jabatan Fungsional masih terdapat kekurangan pegawai yaitu; Pengelola Keuangan 1 orang, Analis Kelembagaan 1 orang, Pengelola Pemanfaatan BMD 1 orang, Pengelola Kepegawaian 1 orang, Pengelola Andalalin 1 orang, Pengawas Transportasi 1 orang, Pengelola Teknologi Informasi 1 orang, Analis Lalu Lintas 1 orang, Analis Transportasi 1 orang, Pengawas Lalu Lintas Darat 8 orang, Pengelola Data Transportasi Jalan Darat 2 orang, Pengatur Lalu Lintas Jalan 2 orang, Pengelola Pengujian Kendaraan 2 orang, Pengadministrasi Pengujian 2 orang, Pengelola Angkutan Kendaraan 3 orang, Analis Kebutuhan Perlengkapan Jalan 1 orang, Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana 2 orang, Pengelola Sarana dan Prasarana 3 orang, Penagih Retribusi 5 orang, dan Pengelola Terminal 4 orang.

1.3.2 Sarana Prasarana/ BMD

Sedangkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang diperlukan adanya sarana dan prasarana. Sarana dan

prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Rembang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	Unit	3	-
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	Unit	1	-
3	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Listrik	Unit	2	-
4	Tanah Kampung	Unit	1	-
5	<i>Air Compressor</i>	Unit	1	-
6	<i>Portable Generating Set</i>	Unit	1	-
7	<i>Portable Water Pump</i>	Unit	1	-
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	-
9	<i>Station Wagon</i>	Unit	2	-
10	<i>Truck + Attachment</i>	Unit	3	-
11	<i>Pick up</i>	Unit	2	-
12	Sepeda Motor	Unit	25	-
13	Gerobak Dorong	Unit	4	-
14	Roda Tiga/ Gerobak Kayuh Berinsulasi	Unit	2	-
15	<i>Out Boat Motor</i>	Unit	1	-
16	<i>Global Positioning System</i>	Unit	1	-
17	Alat Ukur/ Pembanding Lainnya (Dst)	Unit	3	-
18	Alat Ukur Lain-Lain Lainnya (Dst)	Unit	5	-
19	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Unit	2	-
20	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Buah	4	-
21	Lemari Kayu	Buah	26	-
22	Rak besi	Unit	2	-
23	Rak Kayu	Buah	8	-
24	Brankas	Unit	1	-
25	CCTV - <i>Camera Control Television System</i>	Unit	1	-
26	Papan Visual/Papan Nama	Unit	1	-
27	<i>White Board</i>	Unit	1	-
28	Mesin Absensi	Unit	1	-
29	Alat Kantor Lainnya	Unit	32	-
30	Meja Kerja Kayu	Unit	7	-
31	Kursi Kayu	Unit	6	-
32	Meja Rapat	Unit	3	-
33	Tempat Tidur Besi	Unit	1	-
34	Tempat Tidur Kayu	Unit	1	-
35	Meja Panjang	Unit	2	-
36	Meja 1/2 Biro	Unit	39	-
37	Meja Makan Besi	Unit	1	-
38	Kursi Rapat	Unit	91	-
39	Kursi Tamu	Set	3	-
40	Kursi Biasa	Unit	28	-
41	Bangku Tunggu	Unit	13	-
42	Kursi Lipat	Unit	25	-
43	Mesin Penghisap Debu/ <i>Vacuum Cleaner</i>	Unit	1	-
44	Mesin Pemetong Rumput	Unit	4	-
45	<i>A.C. Window</i>	Unit	1	-
46	<i>AC Split</i>	Unit	18	-
47	Kipas Angin	Unit	6	-
48	TV	Unit	3	-
49	<i>Sound System</i>	Unit	2	-

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
50	Compact Disc	Unit	1	-
51	Microphone	Unit	2	-
52	Unit Power Supply	Unit	2	-
53	Stabilisator	Unit	1	-
54	Camera Video	Unit	15	-
55	Camera film	Unit	8	-
56	Tangga Aluminium	Unit	2	-
57	Dispenser	Unit	8	-
58	Handy Cam	Unit	1	-
59	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	20	-
60	Alat Pembantu Kebakaran	Unit	4	-
61	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	-
62	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2	-
63	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	5	-
64	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	10	-
65	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Unit	12	-
66	Meja Tamu Biasa	Unit	1	-
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	-
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	1	-
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	4	-
70	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	1	-
71	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	1	-
72	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Unit	1	-
73	Layar Film/Projector	Unit	3	-
74	Contact Printer	Unit	2	-
75	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/ peralatan Ukur Tanah)	Unit	1	-
76	Telephone Mobile	Unit	3	-
77	Handy Talky (HT)	Unit	26	-
78	alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	Unit	1	-
79	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Unit	10	-
80	Genset krisbow	Unit	1	-
81	Head Light Tester	Unit	1	-
82	Alat Uji Gas Buang	Unit	2	-
83	Compressor Unit	Unit	1	-
84	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	11	-
85	Alat Khusus SAR (Search And Resque)	Unit	92	-
86	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	Unit	14	-
87	Pisau Belati	Unit	1	-
88	P.C Unit	Unit	20	-
89	Laptop	Unit	23	-
90	Note Book	Unit	13	-
91	CPU (Peralatan Mainframe)	Unit	1	-
92	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	Unit	4	-
93	Monitor	Unit	9	-
94	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	36	-
95	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	4	-
96	Server	Unit	3	-
97	Tenda	Unit	1	-
98	Traffic Light	Unit	8	-
99	Rambu Bersuar Lainnya (dst) LPJU	Unit	2182	-
100	Rambu Jalan	Unit	435	-
101	Rambu Jembatan	Unit	22	-
102	Rambu Larangan	Unit	1	-
103	Rambu Peringatan	Unit	34	-

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
104	Rambu Petunjuk	Unit	18	-
105	<i>Guardrail</i>	Unit	10	-
106	Rambu Lalin Darat Lainnya	Unit	1	-
107	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2	-
108	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Unit	1	-
109	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	-
110	Gedung Garasi/ <i>Pool Permanen</i>	Unit	2	-
111	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Permanen	Unit	1	-
112	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	Unit	10	-
113	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	-
114	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Unit	2	-
115	Bangunan Stasiun Permanen	Unit	1	-
116	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit	2	-
117	Jalan Kabupaten Lokal (Jalan Lainnya)	Unit	3	-
118	Jalan Khusus Lain-lain	Unit	5	-
119	Saluran <i>Drainase</i>	Unit	1	-
120	Sumur Resapan	Unit	1	-
121	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	Unit	4	-
122	Instalasi PLTB Kapasitas Kecil	Unit	2	-
123	Jaringan Transmisi Tegangan 1 S/D 3 KVA	Unit	1	-
124	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	Unit	24	-
125	Jaringan Transmisi Lain-lain	Unit	6	-
126	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	Unit	2	-
127	Jaringan Distribusi Lain-lain	Unit	2	-
128	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	Unit	2	-
129	<i>Software</i>	Unit	5	-

Sumber : Data BMD Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang 2025

1.3.3 Anggaran

Anggaran Belanja TA 2025 dan Anggaran Belanja TA 2026 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Sebelum (Rp)	Setelah (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sebelum (Rp)	Setelah (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.359.500.000	513.277.190	(846.222.810)	1.153.000.000	593.512.800	(559.487.200)
4.1.02	Retribusi Daerah	1.359.500.000	513.277.190	(846.222.810)	1.153.000.000	593.512.800	(559.487.200)
5.1	Belanja Operasi	20.843.675.362	20.336.178.712	(507.496.650)	17.158.727.957	21.289.536.688	4.130.808.731
5.1.01	Belanja Pegawai	4.907.356.882	4.761.744.667	(145.612.215)	5.037.317.857	5.265.153.588	227.835.731
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.936.318.480	15.574.434.045	(361.884.435)	12.121.410.100	16.024.383.100	3.902.973.000
5.2	Belanja Modal	401.425.550	379.856.425	(21.569.125)	3.708.200.900	4.141.176.400	432.975.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	401.425.550	379.856.425	(21.569.125)	3.558.200.900	3.784.176.400	225.975.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	150.000.000	357.000.000	207.000.000

Sumber : DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025

Tabel 1. 6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
1	Agar dilakukan penyusunan pedoman teknis tentang penyusunan rencana aksi unit organisasi pengampu perihal penerbitan Pedoman Penyusunan dokumen Renaksi, yang dilengkapi dengan penanggung jawab / pengampu atas masing masing indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.	Menyusun Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi yang memuat Penanggung jawab indikator (pegawai/unit)	Tuntas	Kepala Dinas Perhubungan	https://drive.google.com/file/d/1xevTbr41qK4IbAdMnDbiGeL5nak6OxZ1/view?usp=drive_link
2	Memastikan pengelolaan informasi atas dokumen perencanaan, laporan kinerja terpublikasi secara luas dan mudah diakses baik. Baik melalui website maupun media lain.	Menghubungi operator web, dan melanjutkan ke pengelola dan admin web tentang kesalahan web yang terjadi	Proses	Kepala Dinas Perhubungan	
3	Memastikan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Tahunan utamanya perubahan RENJA tahun 2025 secara lebih cermat. "Penetapan indikator dan target kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis. apabila terdapat penyesuaian indikator maupun target kinerja dalam dalam dokumen RENJA agar disertai penjelasan / analisis logis yang menjelaskan penyesuaian tersebut".	Melengkapi narasi penyesuaian dalam dokumen perubahan RENJA	Tuntas	Kepala Dinas Perhubungan	https://drive.google.com/file/d/1XPP75xNcqUzbeiwCcB7onT6vsD7-5ovz/view?usp=drive_link
4	Memperbaiki dokumen pohon kinerja dengan mencantumkan crosscutting antar bidang dalam dokumen pohon kinerja.	Akan diperbaiki pohon kinerja dengan mencantumkan crosscutting	Tuntas	Kepala Dinas Perhubungan	https://drive.google.com/file/d/1dP4yIOADHtIrGaX-z-fB25oXTisVZNhP/view?usp=drive_link
5	Memastikan rumusan hasil (tujuan/sasaran) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang untuk periode perencanaan renstra 2021-2026 pada dokumen pohon kinerja, cascading, renstra, renja, RKT dan Renaksi yakni.	Akan disesuaikan indikator kinerja dalam dokumen pohon kinerja, cascading, renstra, renja,	Tuntas	Kepala Dinas Perhubungan	https://drive.google.com/drive/folders/1M3VAMQqTunxS_4iZKndq3UjIrkBUoDO

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		RKT dan Renaksi).			
6	Memastikan keselarasan antara Rencana Kerja (RENJA) dengan rencana aktivitas kinerja (RENAKSI, PK, SKP). "Rencana aktivitas yang akan dilaksanakan oleh setiap pegawai harus sesuai dan mencakup keseluruhan rencana kinerja yang telah ditetapkan. setiap indikator dan target kinerja harus diperjanjikan dalam PK / SKP oleh pengampu. Sehingga Aktivitas yang dilaksanakan mendukung Kinerja organisasi yang akan dicapai."	Melakukan penyesuaian target agar konsisten	Tuntas	Kepala Dinas Perhubungan	https://drive.google.com/drive/folders/1M3VAMQqTunxS_4iZKndq3UjIrkBUoDO
7	Memastikan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah RENSTRA 2025-2029 secara lebih cermat dan Penetapan indikator/target kinerja memenuhi kriteria SMART. "Penetapan indikator / target harus berdasarkan data awal dan pertimbangan kondisi yang ada sehingga dapat berkelanjutan (sustainable -tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis), dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis".	Penyusunan dokumen Renstra 2025-2029 disusun selaras dengan RPJMD dan sesuai dengan kriteria SMART yang berkelanjutan, berbasis <i>baseline</i> dan tidak sering berubah	Tuntas	Kepala Dinas Perhubungan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vEJZPug1q1eFR0DqghOcYkes13FKWM7/edit?usp=drive_link&oid=114721373695130188709&rtpof=true&sd=true
8	Meningkatkan koordinasi antar bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dan unit organisasi terkait untuk meningkatkan kinerja OPD.	Penguatan koordinasi lintas bidang	untuk SAKIP 2025	Kepala Dinas Perhubungan	
9	Agar kegiatan rapat pada tahapan perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja dapat terdokumentasi diarsipkan secara lengkap.	Digitalisasi arsip dokumentasi perencanaan	Tahun berikutnya	Kepala Dinas Perhubungan	
10	Memastikan penyusunan profil indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang utamanya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah 2025-2029 pada setiap level kinerja (tujuan/sasaran/program/kegiatan) secara detail melalui judul, diskripsi, formulasi perhitungan, sumber data, periode pengukuran dan penanggung jawab. Informasi dalam profil kinerja agar rinci dan jelas sehingga indikator kinerja memenuhi kriteria yang SMART.	Menyusun Profil Indikator Kinerja yang memuat: -Definisi operasional -Rumus perhitungan -Sumber data -Periode pengukuran -Penanggung jawab -Harmonisasi profil indikator dengan Renstra 2025-2029.	Tuntas	Kepala Dinas Perhubungan	https://drive.google.com/file/d/1RKXTe1HBfvuXTqbSX_SJrV4tIRXdjwUs/view?usp=drive_link
11	Meningkatkan monitoring dan pengendalian dalam upaya peningkatan kinerja OPD melalui Monev berkala tingkat di unit / bidang serta tingkat Perangkat Daerah, dibuktikan dengan adanya laporan triwulanan 1 s/d 4 serta terdokumentasikan secara lengkap dan tertib.	Akan melengkapi dokumentasi monev triwulanan secara sistematis	untuk SAKIP 2025	Kepala Dinas Perhubungan	
12	Memastikan penyusunan dokumen laporan kinerja Tahunan utamanya LKJ tahun 2025 secara lebih cermat. Penyusunan laporan kinerja harus memperhatikan format dan substansi. Serta catatan atas hasil reвью penyusunan laporan kinerja dapat ditindak lanjuti secara tuntas.	Pemenuhan seluruh catatan hasil reвью sebelumnya.	Belum terealisasi	Kepala Dinas Perhubungan	
13	Agar dapat Mengoptimalkan penggunaan informasi dalam laporan kinerja (capaian kinerja, saran rekomendasi) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun perencanaan aktifitas pada periode berikutnya.	Menjadikan hasil evaluasi LKJIP sebagai dasar penyusunan RENJA tahun berikutnya	Tuntas	Kepala Dinas Perhubungan	https://drive.google.com/file/d/1XPP75xNcqUzbeiwCcB7onT6vsD7-5ovz/view?usp=drive_link
14	Memastikan kembali rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara tuntas dan konsisten. Sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan	Inventarisasi seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Tuntas	Kepala Dinas Perhubungan	

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
	kinerja dan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	tahun sebelumnya			
15	Mengoptimalkan penggunaan platform digital yang telah dibangun sebagai sarana peningkatan kualitas layanan dan target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Evaluasi kendala teknis dan non-teknis platform SIRAJA	Tuntas	Kepala Dinas Perhubungan	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfalCEvLmjH8tE2sJewYLE-fivV6ocUJALHsM21jX9f2l-g/viewform

1.5 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2042;
22. Peraturan Bupati No 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.
23. Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Perencanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Rembang yang tertuang dalam visi “Rembang Gemilang 2025”, khususnya dalam mendukung **Misi III** yaitu “Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”. Melalui misi tersebut, Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi dan konektivitas wilayah guna menunjang mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan cascading kinerja perangkat daerah, tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur transportasi. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator tujuan berupa Indeks Infrastruktur sebagai gambaran tingkat keberhasilan pembangunan dan pelayanan infrastruktur daerah. Dalam mendukung tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur”** dengan indikator sasaran berupa Indeks Konektivitas yang mencerminkan tingkat keterhubungan wilayah dan kelancaran sistem transportasi di Kabupaten Rembang.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam waktu lima tahun dijabarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2021)	Target Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
A. TUJUAN									
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	Indeks Konektivitas	%	NA	28,07	36,35	46,71	62,25	71,62
B. SASARAN									
2	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan perlengkapan Jalan	%	NA	28,57	42,86	57,14	85,71	100
3	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	%	NA	27,34	35,84	47,17	63,21	71,7
4	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas	%	NA	28,58	30,69	36,3	38,48	43,9

2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan merupakan ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Berikut adalah IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang TA 2021-2029:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	NA	28,57	42,86	57,14	85,71	100
2	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	%	NA	27,34	35,84	47,17	63,21	71,70
3	Indeks Peningkatan Keselamatan lalu Lintas	%	NA	28,58	30,69	36,3	38,48	43,90

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah, keselamatan transportasi, dan kualitas pelayanan publik di bidang perhubungan. Arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi manajemen lalu lintas, peningkatan pengujian kendaraan bermotor, penataan terminal dan perparkiran, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis kinerja guna mendukung terwujudnya sistem transportasi yang aman, tertib, dan lancar di Kabupaten Rembang.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/ fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. Adapun strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel:

Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

No	Tujuan		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	1	Peningkatan keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi	1	Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi
				2	Mengembangkan dan mengintegrasikan sarana angkutan umum missal
				3	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana transportasi (terminal, pelabuhan, dermaga) serta fasilitas perlengkapan jalan
				4	Optimalisasi pengelolaan parkir

2.4 Struktur Program dan Kegiatan 2025

Struktur program dan kegiatan Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang disusun sebagai bentuk penjabaran tujuan dan sasaran. Pelaksanaan program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

Tabel 2. 4 Struktur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang Berkontribusi Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

NO	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih
1	2	3	4	5	6	7
			2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	15.771.939.757	19.386.047.988	3.614.108.231
			2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.300.000	2.303.000	3.000
			2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.300.000	2.303.000	3.000
			2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.196.887.857	5.416.343.588	219.455.731
			2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.037.317.857	5.265.153.588	227.835.731
			2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	159.570.000	151.190.000	(8.380.000)
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.202.000	132.956.000	8.754.000
			2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	652.000	652.000	0
			2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.090.000	2.010.000	920.000
			2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.256.000	22.756.000	5.500.000
			2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	20.000.000	0
			2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	22.555.500	2.555.500
			2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	5.000.000	5.000.000
			2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	0
			2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.204.000	44.982.500	(5.221.500)

NO	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih
1	2	3	4	5	6	7
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.480.900	60.096.400	3.615.500
			2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.480.900	60.096.400	3.615.500
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.253.257.000	13.615.076.000	3.361.819.000
			2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.900.000	500.000
			2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.050.400.000	13.124.400.000	3.074.000.000
			2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.457.000	487.776.000	287.319.000
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.812.000	159.273.000	20.461.000
			2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.082.000	57.543.000	7.461.000
			2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.730.000	18.730.000	0
			2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	83.000.000	13.000.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan Meningkatkan kenyamanan dan kehandalan angkutan Meningkatkan Lalulintas yang berkeselamatan	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.069.989.100	5.955.815.100	538.512.000
			2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	3.690.194.000	4.010.310.000	320.116.000

NO	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih
1	2	3	4	5	6	7
			2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.358.900.000	3.577.296.000	218.396.000
			2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	331.294.000	433.014.000	101.720.000
			2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	0	78.650.000	78.650.000
			2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0	78.650.000	78.650.000
			2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	25.000.000	88.850.000	63.850.000
			2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	180.000.000	400.000.000	220.000.000
			2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	180.000.000	400.000.000	220.000.000
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	340.300.000	340.300.000	0
			2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	158.000.000	158.000.000	0
			2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	160.300.000	160.300.000	0
			2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	22.000.000	22.000.000	0
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	709.495.100	998.815.100	289.320.000

NO	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih
1	2	3	4	5	6	7
			2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	709.495.100	998.815.100	289.320.000
			2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	40.000.000	26.205.000	(13.795.000)
			2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	20.000.000	12.935.000	(7.065.000)
			2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Andalalin	20.000.000	13.270.000	(6.730.000)
			2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	10.000.000	6.875.000	(3.125.000)
			2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	10.000.000	6.875.000	(3.125.000)
			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	94.660.000	(5.340.000)
			2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	94.660.000	(5.340.000)
JUMLAH				20.841.928.857	25.341.863.088	4.152.620.231

Sumber : DPPA Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang TA 2025

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang yang merepresentasikan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dengan Bupati Rembang sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabuptaen Rembang Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tujuan OPD :		
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	Indeks Konektivitas	62,25%
2.	Sasaran OPD :		
2.1	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan	85,71%
2.2	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	63,21%
2.3	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas	38,48%

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut terdapat dukungan anggaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	15.771.939.757	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.069.989.100	APBD
Jumlah		20.841.928.857	APBD

Sumber: DPA Induk Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025

Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan anggaran yang terjadi pada tahun berjalan. Adapun target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya tetap dipertahankan, sedangkan perubahan hanya terdapat pada alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Perhubungan Kabuptaen Rembang Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tujuan OPD :		
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	Indeks Konektivitas	62,25%
2.	Sasaran OPD :		
2.1	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan	85,71%
2.2	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	63,21%
2.3	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas	38,48%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025

Dengan dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	19.386.047.988	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.955.815.100	APBD
Jumlah		25.341.863.088	APBD

Sumber: DPPA Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025

2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang memanfaatkan berbagai instrumen pendukung yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif sebagai berikut:

1. Website Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Gambar 2. 1 Website Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang



Sumber : <https://dinhub.rembangkab.go.id/>

Website Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang merupakan salah satu instrumen pendukung capaian kinerja yang dimanfaatkan sebagai media informasi, pelayanan publik, dan publikasi kegiatan perangkat daerah.

Melalui website ini, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait program dan kegiatan, layanan perhubungan, pengumuman, serta data pendukung lainnya secara lebih mudah dan cepat. Selain mendukung keterbukaan informasi publik, pemanfaatan website juga membantu meningkatkan efektivitas komunikasi, koordinasi, serta akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan.

2. Media Sosial Dinas Perhubungan

Gambar 2. 2 Instagram Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang



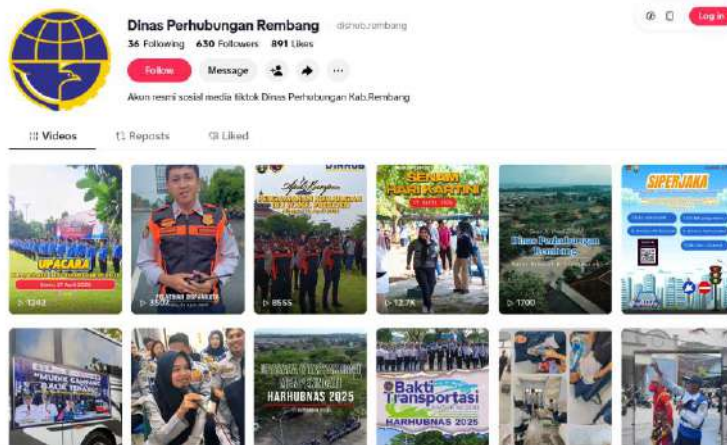
Sumber : <https://www.instagram.com/dishubrembang/>

Gambar 2. 3 Instagram Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang



Sumber : https://www.instagram.com/bid.lalin_dishubrg/

Gambar 2. 4 TikTok Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang



Sumber : <https://www.tiktok.com/@dishub.rembang>

Akun media sosial Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menjadi salah satu media pendukung dalam penyebarluasan informasi dan pelayanan publik di bidang perhubungan. Melalui media sosial Instagram dan TikTok, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menyampaikan berbagai informasi terkait program dan kegiatan, pelayanan transportasi, keselamatan lalu lintas, pengaturan lalu lintas, serta publikasi kegiatan kedinasan secara cepat dan informatif kepada masyarakat. Pemanfaatan media sosial juga mendukung keterbukaan informasi publik, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, serta memperluas jangkauan sosialisasi kebijakan dan pelayanan perhubungan secara digital.

3. *Call Center* Pengaduan Fasilitas Lalu Lintas

Gambar 2. 5 *Call Center* Pengaduan Fasilitas Lalu Lintas



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Merupakan layanan call center pengaduan fasilitas lalu lintas selama 24 jam, yang menerima laporan terkait

kerusakan fasilitas seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), *Traffic Light*, *Warning Light*, dan rambu-rambu lalu lintas. Melalui sistem ini, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara cepat, sementara dinas dapat melakukan pencatatan, tindak lanjut, serta pemantauan progres penanganan secara terstruktur. Pengaduan dapat dilakukan melalui sosial media Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, maupun melalui Whatsapp +62 878-9041-7532.

4. Sistem Informasi Rekomendasi Izin Penggunaan Jalan (SiRAJA)

Gambar 2. 6 SiRAJA Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Merupakan platform digital milik Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan dan penerbitan izin penggunaan jalan. Aplikasi ini membantu pemohon dan pihak dinas untuk melakukan proses permohonan, verifikasi, dan pemberian rekomendasi izin secara lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga memudahkan masyarakat dan pihak terkait dalam mengurus perizinan penggunaan jalan di wilayah Kabupaten Rembang.

5. Call Center Helpdesk Si Handal

Gambar 2. 7 Call Center Si Handal



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menghadirkan layanan terbaru berupa Call Center Helpdesk “Si Handal”, yang difokuskan untuk membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). Melalui layanan ini, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi, melakukan konsultasi, dan menanyakan persyaratan terkait pengajuan dokumen andalalin tanpa harus datang langsung ke kantor. Cukup melalui layanan pesan WhatsApp, masyarakat akan langsung terhubung dengan petugas kami yang siap melayani dengan ramah, cepat, dan solutif.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91%≤100%	Sangat Tinggi
(2)	76%≤90%	Tinggi
(3)	66%≤75%	Sedang
(4)	51%≤65%	Rendah
(5)	≤50%	Sangat Rendah

Sumber : Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Hasil pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025 ditampilkan sebagaimana berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kriteria Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)
			Target	Realisasi	Capaian %			(6:8)x100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Konektivitas	62,25	79,48	127,68%	Sangat Tinggi	62,25	127,68%
1.1	Terjaminnya Ketersediaan	Indeks Perkembangan Ketersediaan	85,71	100	116,67%	Sangat Tinggi	85,71	116,67%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kriteria Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)
			Target	Realisasi	Capaian %			(6:8)x100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Jalan						
1.2	Meningkatnya Kenyamanan dan Keandalan Angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	63,21	82,19	130,03%	Sangat Tinggi	63,21	130,03%
1.3	Meningkatnya Lalulintas Yang Berkeselamatan	Indeks Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas	38,48	57,09	148,36%	Sangat Tinggi	38,48	148,36%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang 2025

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur diukur dengan indikator Indeks Konektivitas sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rumus Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta Data
1	2	3	4
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Konektivitas	$(0,3333 \times \text{Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan}) + (0,33 \times \text{Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan}) + (0,3333 \times \text{Indeks Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas})$

Berdasarkan hasil perhitungan, maka analisis capaian kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah:

Indeks Konektivitas

$$= (0,3333 \times 100) + (0,33 \times 82,19) + (0,3333 \times 57,09)$$

$$= 79,48$$

Capaian kinerja = 127,68%

Nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata tertimbang tiga indikator pembentuk. Secara keseluruhan, capaian kinerja tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025

menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan bidang perhubungan telah berjalan secara efektif dan optimal dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi, konektivitas wilayah, pelayanan angkutan, serta keselamatan lalu lintas.

3.1.2 Sasaran 1:

Tabel 3. 4 Rumusan Indikator Sasaran 1 dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Data
1	2	3	4
1	Terjaminnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	$(1 \times \% \text{tase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota})$

Berdasarkan hasil perhitungan, maka analisis capaian kinerja Sasaran 1 Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah:

Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan

$$= 1 \times 100$$

$$= 100$$

$$\text{Capaian kinerja} = 116,67\%$$

Tercapainya keberhasilan Indikator Sasaran 1 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang diwujudkan melalui realisasi pemasangan sebanyak 528 unit Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Rembang. Selain itu, telah direalisasikan pula pemasangan 12 unit *warning light* pada titik-titik rawan lalu lintas sebagai sarana pendukung keselamatan untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan dan meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya itu, pemasangan berbagai perlengkapan jalan seperti marka jalan, *zebra cross*, pita kejut, serta marka pemisah jalan juga dilaksanakan guna menciptakan keteraturan arus lalu lintas dan meningkatkan disiplin pengguna jalan.

Tabel 3. 5 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Teknis

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%tase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	%	85,71	100	116,67
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	6	Macam	2	33,33
		Jumlah Macam Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terpelihara	7	Macam	5	71,43
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1540	Unit	1530	99,35
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah macam Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	748	Unit	890	118,98

Berdasarkan data capaian kinerja Tahun 2025, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mencapai kinerja sebesar 116,67% pada indikator %tase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan telah terlaksana dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan. Program ini merupakan salah satu program teknis Dinas Perhubungan yang berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, khususnya dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan.

Pelaksanaan program pada tahun 2025 difokuskan ke dalam sejumlah subkegiatan operasional utama, yaitu:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, yang bertujuan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan guna mendukung keselamatan, keamanan,

dan kelancaran lalu lintas. Pada subkegiatan ini, indikator jumlah macam perlengkapan jalan dan prasarana jalan yang tersedia terealisasi sebanyak 2 macam dari target 6 macam atau mencapai 33,33%, sedangkan indikator jumlah macam perlengkapan jalan dan prasarana jalan yang terpelihara terealisasi sebanyak 5 macam dari target 7 macam atau mencapai 71,43%. Selain itu, jumlah perlengkapan jalan yang tersedia mencapai 1.530 unit dari target 1.540 unit atau sebesar 99,35%.

2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, yang difokuskan pada pemeliharaan serta peningkatan kondisi perlengkapan jalan agar tetap berfungsi secara optimal. Pada subkegiatan ini, realisasi jumlah macam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan mencapai 890 unit dari target 748 unit, sehingga memperoleh capaian sebesar 118,98%. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi yang melampaui target yang telah direncanakan.

Gambar 3. 1 Dokumentasi Pemasangan CCTV



Gambar 3. 2 Dokumentasi Monitoring Pemasangan LPJU



3.1.3 Sasaran 2:

Tabel 3. 6 Rumusan Indikator Sasaran 2 dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Data
1	2	3	4
2	Meningkatnya Kenyamanan dan Kehandalan Angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	$(0,3 \times \%tase \text{ Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan}) + (0,4 \times \%tase \text{ Kendaraan Laik Jalan}) + (0,3 \times \%tase \text{ Terminal dan Perparkiran yang Terkelola})$

Berdasarkan hasil perhitungan, maka analisis capaian kinerja Sasaran 2 Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah:

Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan

$$= (0,3 \times 45,72) + (0,4 \times 150) + (0,3 \times 63)$$

$$= 82,19$$

$$\text{Capaian kinerja} = 130,01\%$$

Keberhasilan pencapaian Indikator Sasaran 2 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang diwujudkan melalui pemasangan palang pintu otomatis di Pangkalan Truk Sendangasri Kecamatan Lasem sebagai bentuk modernisasi pengelolaan operasional angkutan barang dan peningkatan efektivitas pelayanan perhubungan serta mengurangi kebocoran retribusi. Selain itu, pelayanan uji berkala kendaraan bermotor (uji KIR) terlaksana secara optimal guna menjamin kelaikan teknis kendaraan serta meningkatkan keselamatan transportasi jalan. Keberhasilan sasaran juga didukung oleh penyelenggaraan program mudik

gratis yang memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat selama masa angkutan Lebaran.

Tabel 3. 7 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Teknis

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%tase Kendaraan Laik Jalan	%	56,80	45,72	80,49
		%tase Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan	%	100	150	150
		%tase Terminal dan Perparkiran yang Terkelola	%	35	63	180
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang Terkelola	Terminal	3	3	100
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang Terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1	1	100
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2	3	150
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kali	3	3	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang diuji	Kendaraan	5522	5004	90,62
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	7	7	100
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	4	4	100
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	2	100
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Macam	2	1	50

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	10	4	40

Berdasarkan data capaian kinerja Tahun 2025, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menunjukkan capaian yang cukup baik dengan beberapa indikator yang telah melampaui target. Program ini merupakan program teknis Dinas Perhubungan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam mewujudkan transportasi yang aman, tertib, lancar, berkeselamatan, serta didukung pelayanan transportasi yang memadai.

Secara umum, capaian program ditunjukkan oleh %tase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan sebesar 150%, %tase Terminal dan Perpustakaan yang Terkelola sebesar 180%, sedangkan %tase Kendaraan Laik Jalan mencapai 80,49%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sarana transportasi dan pelayanan angkutan umum telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek kelaikan kendaraan.

Pelaksanaan program pada tahun 2025 difokuskan ke dalam beberapa subkegiatan utama sebagai berikut:

1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan capaian jumlah terminal penumpang Tipe C yang terkelola sebanyak 3 terminal dari target 3 terminal atau mencapai 100%. Selain itu, jumlah terminal yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas

penunjang juga mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C, yang berhasil merehabilitasi dan memelihara 3 unit terminal dari target 2 unit, sehingga mencapai 150%.
3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, yang terealisasi sebanyak 3 kali dari target 3 kali atau mencapai 100%. Kegiatan ini didukung dengan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin yang juga mencapai 100%.
4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang menghasilkan realisasi kendaraan wajib uji sebanyak 5.004 kendaraan dari target 5.522 kendaraan atau mencapai 90,62%. Meskipun belum memenuhi target secara penuh, capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat yang cukup baik dalam melakukan uji berkala kendaraan.
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang seluruh indikatornya mencapai 100%, baik untuk penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, sehingga mendukung kelancaran pelayanan pengujian kendaraan.
6. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang terealisasi sesuai target dengan capaian 100%, sebagai upaya memastikan kualitas dan standar pelayanan pengujian kendaraan tetap terjaga.
7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang mencapai 50% untuk jumlah penyediaan

angkutan umum dan 40% untuk jumlah armada angkutan umum yang tersedia. Capaian ini menunjukkan masih terdapat tantangan dalam penyediaan layanan angkutan umum yang memadai dan perlu menjadi perhatian pada tahun berikutnya.

Gambar 3. 3 Dokumentasi Pemeliharaan Alat Uji



Gambar 3. 4 Dokumentasi Monitoring dan Pengawasan Parkir Tepi Jalan Umum



Gambar 3. 5 Dokumentasi Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Terminal



Gambar 3. 6 Dokumentasi Evaluasi Jaringan Trayek dan Kebutuhan Angdes



Gambar 3. 7 Dokumentasi Pemberangkatan Bus Mudik Gratis



3.1.4 Sasaran 3:

Tabel 3. 8 Rumusan Indikator Sasaran 3 dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Data
1	2	3	4
3	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan Keselamatan lalu Lintas	$(0,33 \times \%tase \text{ Lalulintas Berkeselamatan}) + (0,33 \times \%tase \text{ Jumlah Manajemen Rekayasa Lalulintas yang Terlaksana}) + (0,33 \times \%tase \text{ Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ})$

Berdasarkan hasil perhitungan, maka analisis capaian kinerja Sasaran 3 Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah:

$$\begin{aligned} &\text{Indeks Peningkatan Keselamatan lalu Lintas} \\ &= (0,33 \times 153) + (0,33 \times 33,33) + (0,33 \times 20) \\ &= 68,09 \end{aligned}$$

$$\text{Capaian kinerja} = 187,57\%$$

Keberhasilan pencapaian Indikator Sasaran 3 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan manajemen lalu lintas secara terpadu guna meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pengamanan, pengawasan, dan

pengendalian lalu lintas (PAM) pada titik-titik strategis dan kawasan dengan tingkat mobilitas tinggi, sehingga mampu mendukung terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Selain itu, penataan manajemen lalu lintas dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan arus kendaraan dan meminimalisir potensi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas.

Keberhasilan sasaran juga didukung oleh pelaksanaan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) sebagai instrumen pengendalian pembangunan agar tetap memperhatikan kapasitas dan keselamatan jaringan transportasi. Di samping itu, audit dan inspeksi terminal dilaksanakan secara berkala guna memastikan pemenuhan standar pelayanan dan keselamatan operasional transportasi. Optimalisasi pelayanan transportasi selama periode hari besar keagamaan turut diwujudkan melalui penyelenggaraan Posko Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Posko Hari Raya Idul Fitri guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, meningkatkan keselamatan perjalanan, dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengendalian transportasi.

Keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan tersebut di dukung oleh keberhasilan program , kegiatan dan sub kegiatan (pendukung dan teknis) sebagai berikut;

Tabel 3. 9 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Teknis

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%tase Lalu Lintas Berkeselamatan	%	76,60	153	199,74
%tase Jumlah Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Terlaksana		%	20	33,33	166,65	
%tase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ		%	20	20	100	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Kali	4	4	100

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
		Kabupaten/ Kota				
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan	80	100	125
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan	1	28	2800
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kali	3	3	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	4	11	275
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	Laporan	2	3	150
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	4	4	100
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kali	2	2	100
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	5	2	40

Berdasarkan data capaian kinerja Tahun 2025, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memperoleh capaian yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh %tase Lalu Lintas Berkendara Berkeselamatan sebesar 199,74%, %tase Jumlah Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Terlaksana sebesar 166,65%, dan %tase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya peningkatan keselamatan dan kelancaran lalu lintas telah dilaksanakan secara optimal dan mampu melampaui target yang ditetapkan.

Program ini merupakan salah satu program teknis Dinas Perhubungan yang berperan dalam mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, khususnya dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan. Pelaksanaan program pada tahun 2025 difokuskan ke dalam sejumlah subkegiatan operasional utama sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota, realisasi pelaksanaan kegiatan mencapai 4 kali dari target 4 kali atau 100%, menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target.
2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota, realisasi laporan pengawasan dan pengendalian mencapai 100 laporan dari target 80 laporan atau sebesar 125%, yang menunjukkan meningkatnya intensitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas.
3. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota, kegiatan ini menghasilkan 28 laporan dari target 1 laporan, dengan capaian sebesar 2.800%, yang menunjukkan tingginya kebutuhan penanganan dan penataan lalu lintas di lapangan.
4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota, realisasi persetujuan hasil Andalalin mencapai 3 kali dari target 3 kali atau 100%.
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin mencapai 11 laporan dari target 4 laporan atau sebesar 275%. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kebutuhan koordinasi lintas sektor dalam proses penilaian dampak lalu lintas.

6. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin, kegiatan penetapan kebijakan tata kelola Andalalin terealisasi sebanyak 3 laporan dari target 2 laporan atau mencapai 150%, sebagai bentuk penguatan regulasi dan tata kelola penyelenggaraan lalu lintas.
7. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin, kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis Andalalin mencapai target 100%, dengan realisasi 4 laporan sesuai target yang ditetapkan.
8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan terealisasi 2 kali dari target 2 kali atau mencapai 100%.
9. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal, kegiatan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal terealisasi 2 laporan dari target 5 laporan atau mencapai 40%. Belum optimalnya capaian ini disebabkan oleh keterbatasan pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian prioritas program selama tahun berjalan.

Gambar 3. 8 Dokumentasi Posko Lebaran



Gambar 3. 9 Dokumentasi Penindakan Aduan Parkir Liar



Gambar 3. 10 Dokumentasi Pengaturan Lalu Lintas



Gambar 3. 11 Dokumentasi Giat Patroli Malam



Tabel 3. 10 Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	Angka	71		0,00
		Nilai IKM	Angka	85,26	93,00	109,08
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bln	60	60	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	%	100	100	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	5	25,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4	80,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	26	29	111,54
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1	8,33
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	Paket	60	60	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	11	91,67
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur	%	100	100	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	14	700,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	%	100	100	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	37	45	121,62
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	19	950,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	%tase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	%	85,70	100	116,69
		%tase kendaraan laik jalan	%	56,80	45,72	80,49
		%tase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	%	100,00	150	150,00
		%tase Terminal dan perparkiran yang terkelola	%	35,00	63	180,00
		%tase Lalulintas berkeselamatan	%	76,60	153,00	199,74
		%tase jumlah manajemen rekayasa lalu lintas yang terlaksana	%	20,00	33,33	166,65
		%tase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	%	20,00	20	100,00
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan	Macam	6	2

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
		Kabupaten/Kota yang tersedia				
		Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang terpelihara	Macam	7	5	71,43
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	1540	1530	99,35
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah macam Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Unit	748	890	118,98
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang terkelola	Terminal	3	3	100,00
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1	1	100,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara	Unit	2	3	150,00
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kali	3	3	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	Kendaraan	5522	5004	90,62
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	7	7	100,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	4	4	100,00
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	2	100,00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Macam	2	1	50,00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	10	4	40,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Kali	4	4	100,00

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
		Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota				
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	80	100	125,00
	Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kali	3	3	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	4	11	275,00
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	4	4	100,00
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kali	2	2	100,00
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	5	2	40,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian rata-rata mendekati atau mencapai 100%. Kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pengadaan barang milik daerah, serta pemeliharaan barang milik daerah terlaksana secara optimal sehingga mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Beberapa sub kegiatan bahkan melampaui target yang ditetapkan, antara lain penyediaan peralatan rumah tangga kantor dengan capaian 111,54%, pemeliharaan kendaraan dinas operasional dengan capaian 121,62%, pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar 700%, serta pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebesar 950%.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa sub kegiatan yang belum mencapai target, antara lain penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian 25%, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar 8,33%, serta penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 80%. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kebutuhan riil selama tahun berjalan, efisiensi belanja, maupun penyesuaian prioritas pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, Program Penunjang telah berhasil mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan melalui penyediaan layanan administrasi, sarana prasarana, serta dukungan operasional perangkat daerah yang memadai.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian program sebesar 116,69% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan teknis bidang perhubungan. Secara keseluruhan, Program LLAJ berhasil mencapai dan melampaui target kinerja yang ditetapkan.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya serta Target Jangka Menengah pada Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Untuk mengetahui tingkat perkembangan, konsistensi, dan keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang pada periode Renstra 2021-2026 ditampilkan pada tabel perbandingan berikut:

Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Konektivitas	%	NA	-	-	28,07	27,97	99,64	36,35	37,5	103,16	46,71	55,5	118,82	62,25	79,48	127,68
1.1	Terjaminnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	NA	-	-	28,57	42,85	149,98	42,86	57,14	133,32	57,14	85,71	150,00	85,71	100	116,67
1.2	Meningkatnya Kenyamanan dan Keandalan Angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	%	NA	-	-	27,34	21,92	80,18	35,84	32,28	90,07	47,17	50,82	107,74	63,21	82,19	130,03
1.3	Meningkatnya Lalu Lintas yang Berkeselamatan	Indeks Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas	%	NA	-	-	28,58	20	69,98	30,69	23,65	77,06	36,3	30,8	84,85	38,48	57,09	148,36

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan konsisten. Hal ini terlihat dari seluruh indikator sasaran strategis yang mampu melampaui target yang telah ditetapkan, bahkan melebihi capaian tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan bidang perhubungan telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026. Tidak tersediaannya data pada tahun 2021 adalah karena adanya perubahan perumusan sasaran strategis dengan tahun-tahun berikutnya.

Berikut adalah analisis atas sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang:

1. Pada sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur” dengan indikator Indeks Konektivitas, realisasi Tahun 2025 mencapai sebesar 79,48 dari target 62,25 atau sebesar 127,68%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terjadi peningkatan capaian dari 99,64% pada Tahun 2022, meningkat menjadi 103,16% pada Tahun 2023, kemudian 118,82% pada Tahun 2024, dan mencapai 127,68% pada Tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya tren positif dalam peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi di Kabupaten Rembang. Selain itu, capaian Tahun 2025 juga telah melampaui target jangka menengah Renstra Tahun 2021–2026 sebesar 62,25 sehingga menunjukkan bahwa sasaran strategis telah tercapai secara optimal. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan, meningkatnya pelayanan angkutan, serta meningkatnya keselamatan lalu lintas.
2. Pada sasaran strategis Terjaminnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan dengan indikator Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan, realisasi Tahun 2025 mencapai 100 dari target 85,71 dengan capaian sebesar

116,67%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian pada Tahun 2022 sebesar 149,98%, Tahun 2023 sebesar 133,32%, dan Tahun 2024 sebesar 150%. Walaupun secara %tase capaian Tahun 2025 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, namun hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya target kinerja pada Tahun 2025. Secara substansi, realisasi kinerja tetap menunjukkan peningkatan dan telah melampaui target jangka menengah Renstra. Keberhasilan tersebut didukung oleh pemasangan LPJU, warning light, marka jalan, zebra cross, pita kejut, serta rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di berbagai ruas jalan Kabupaten Rembang. Adapun beberapa subkegiatan yang belum optimal, seperti penyediaan jenis perlengkapan jalan tertentu dan pemeliharaan perlengkapan jalan, disebabkan oleh keterbatasan anggaran, prioritas kebutuhan lapangan, dan proses pengadaan yang membutuhkan penyesuaian teknis.

3. Pada sasaran strategis Meningkatkan Kenyamanan dan Keandalan Angkutan dengan indikator Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan, realisasi Tahun 2025 mencapai 82,19 dari target 63,21 dengan capaian sebesar 130,03%. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding Tahun 2022 sebesar 80,18%, Tahun 2023 sebesar 90,07%, dan Tahun 2024 sebesar 107,74%. Dengan demikian, capaian Tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh optimalisasi pelayanan transportasi melalui pemasangan palang pintu otomatis di Pangkalan Truk Sendangasri, peningkatan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor, pengelolaan terminal dan perparkiran, serta pelaksanaan program mudik gratis. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, seperti jumlah armada angkutan umum yang tersedia dan penyediaan angkutan umum antar kota dalam daerah kabupaten/kota. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan armada operasional, menurunnya minat

masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum, serta rendahnya kepatuhan sebagian pemilik kendaraan dalam melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor.

4. Pada sasaran strategis Meningkatnya Lalu Lintas yang Berkeselamatan dengan indikator Indeks Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas, realisasi Tahun 2025 mencapai 57,09 dari target 38,48 dengan capaian sebesar 148,36%. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 69,98%, Tahun 2023 sebesar 77,06%, dan Tahun 2024 sebesar 84,85%, maka terjadi peningkatan capaian yang sangat signifikan pada Tahun 2025. Capaian tersebut juga telah melampaui target jangka menengah Renstra Tahun 2021–2026. Keberhasilan sasaran ini dipengaruhi oleh optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, penataan manajemen rekayasa lalu lintas, pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ, persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), serta penyelenggaraan Posko Natal dan Tahun Baru maupun Posko Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, tingginya capaian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengaturan lalu lintas di wilayah Kabupaten Rembang. Meski demikian, pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, waktu pelaksanaan, dan tingginya prioritas kegiatan pengaturan lalu lintas pada momentum tertentu.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa seluruh sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang mengalami peningkatan yang positif dan telah melampaui target jangka menengah Renstra Tahun 2021–2026. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan bidang perhubungan telah berjalan efektif, terukur, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan transportasi,

konektivitas wilayah, kenyamanan pelayanan angkutan, serta keselamatan lalu lintas di Kabupaten Rembang. Namun demikian, peningkatan kualitas perencanaan, penguatan sarana dan prasarana, optimalisasi pengawasan, serta peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi tetap perlu dilakukan guna menjaga keberlanjutan capaian kinerja pada tahun-tahun mendatang.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Nasional/ Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Berikut menyajikan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dengan capaian kinerja tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah, serta kabupaten/kota sekitar sebagai bahan analisis untuk menilai posisi kinerja daerah, tingkat daya saing, serta keselarasan capaian terhadap standar dan perkembangan wilayah yang lebih luas.

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasai Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Nasional/ Provinsis dan Kabupaten Sekitar

No	Indikator	Realisasi 2025	Realisasi Provinsi 2025	Realisasi Kemenhub 2025	Realisasi Daerah Sekitar			
					Pati	Kudus	Jejara	Blora
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Konektivitas	79,48	6,3	-	-	-	89,2	83,07
2	Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	100	0,4	0,77	-	-	58,65	70
3	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	82,19	85,2	75,3	-	-	98	-
4	Indeks Peningkatan Keselamatan lalu Lintas	57,09	15,33	19,24	-	-	86,68	-

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan, serta kabupaten sekitar menunjukkan bahwa secara umum kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang berada pada kategori baik dan kompetitif. Meskipun demikian, dalam melakukan perbandingan perlu diperhatikan bahwa indikator yang digunakan antar instansi tidak seluruhnya sama secara langsung, melainkan memiliki kesamaan substansi dan tujuan

pengukuran. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan perumusan indikator, metode penghitungan, ruang lingkup kewenangan, serta karakteristik wilayah masing-masing instansi. Oleh karena itu, hasil perbandingan digunakan sebagai gambaran umum terhadap posisi capaian kinerja Kabupaten Rembang dibandingkan daerah lain maupun pemerintah pusat.

Pada indikator Indeks Konektivitas, realisasi Kabupaten Rembang Tahun 2025 sebesar 79,48, lebih tinggi dibandingkan realisasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,3. Sementara itu, Kabupaten Jepara mencapai 89,2 dan Kabupaten Blora sebesar 83,07. Perbedaan angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena masing-masing daerah menggunakan formulasi dan komponen penilaian yang berbeda. Namun demikian, capaian Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa kualitas konektivitas dan pelayanan infrastruktur transportasi daerah telah berjalan cukup baik dan kompetitif dibanding daerah sekitar. Tidak tersedianya data pembanding dari Kementerian Perhubungan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kudus disebabkan adanya perbedaan indikator maupun tidak tersedianya indikator sejenis pada dokumen kinerja instansi terkait.

Pada indikator Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan, Kabupaten Rembang memperoleh realisasi sebesar 100, lebih tinggi dibandingkan realisasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,4, Kementerian Perhubungan sebesar 0,77, Kabupaten Jepara sebesar 58,65, dan Kabupaten Blora sebesar 70. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan dan pengembangan perlengkapan jalan di Kabupaten Rembang telah berjalan dengan optimal. Meskipun demikian, perbedaan formulasi indikator antar instansi menyebabkan hasil perbandingan tidak dapat disamakan secara absolut karena adanya perbedaan metode penilaian dan ruang lingkup kewenangan pengelolaan jalan.

Pada indikator Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan, Kabupaten Rembang memperoleh realisasi sebesar 82,19, sedikit lebih rendah dibandingkan Kabupaten Jepara sebesar 98, namun

masih lebih tinggi dibandingkan Kementerian Perhubungan sebesar 75,3. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah mencatat capaian sebesar 85,2. Capaian Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa pelayanan angkutan umum, pengelolaan terminal, dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor telah berjalan cukup baik. Adapun perbedaan capaian dengan daerah lain dipengaruhi oleh kondisi wilayah, tingkat mobilitas masyarakat, jumlah armada angkutan umum, serta kebijakan pengelolaan transportasi di masing-masing daerah.

Pada indikator Indeks Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas, Kabupaten Rembang memperoleh realisasi sebesar 57,09, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 15,33 dan Kementerian Perhubungan sebesar 19,24, namun masih berada di bawah Kabupaten Jepara sebesar 86,68. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Rembang telah berjalan cukup baik. Perbedaan capaian antar daerah dipengaruhi oleh tingkat kepadatan lalu lintas, kondisi jaringan jalan, tingkat mobilitas masyarakat, serta metode pengukuran indikator keselamatan lalu lintas yang berbeda antar instansi.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025 cukup kompetitif dibandingkan pemerintah provinsi maupun kabupaten sekitar. Walaupun terdapat perbedaan indikator dan metode perhitungan antar instansi, capaian kinerja Kabupaten Rembang menunjukkan tren positif dalam peningkatan kualitas pelayanan transportasi, ketersediaan perlengkapan jalan, pelayanan angkutan, dan keselamatan lalu lintas.

3.4 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Terhadap Capaian Sasaran Pemda

Sebagaimana amanat cascading Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Kontribusi Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Terhadap Sasaran Pemda

No	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah	Indeks Insfrastruktur	66,34	55,24	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Konektivitas	62,25	79,48
					Terjaminnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	85,71	100
					Meningkatnya Kenyamanan dan Keandalan Angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	63,21	82,19
					Meningkatnya Lalulintas Yang Berkeselamatan	Indeks Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas	38,48	57,09

3.5 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Perhubunhan Kabupaten Rembang sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Tabel 3. 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	Indeks Konektivitas	62,25	79,48	127,68	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.044.665.100	5.012.905.536	82,93
1.1	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	85,71	100	116,67				
1.2	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	63,21	82,19	130,03				
1.3	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan Keselamatan lalu Lintas	38,48	57,09	148,36				
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.386.047.988	18.519.331.215	95,53
Total							25.430.713.088	23.532.236.751	92,53

3.6 Analisis Efisiensi Anggaran

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 15 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	Indeks Konektivitas	62,25	79,48	127,68	6.044.665.100	5.012.905.536	82,93	1.031.759.564
1.1	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	85,71	100	116,67	4.010.310.000	3.047.426.834	75,99	962.883.166
1.2	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan dan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	63,21	82,19	130,03	1.002.460.000	958.212.310	95,59	44.247.690
1.3	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan Keselamatan lalu Lintas	38,48	57,09	148,36	1.031.895.100	1.007.266.392	97,61	24.628.708

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	Indeks Konektivitas	127,68%	82,93%	Efisien karena capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan, sedangkan realisasi keuangan lebih rendah dari pagu anggaran sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.031.759.564.
Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	116,67%	75,99%	Sangat efisien karena capaian kinerja melampaui target dengan realisasi keuangan yang relatif rendah dibanding pagu anggaran, sehingga menghasilkan efisiensi sebesar Rp962.883.166.
Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	130,03%	95,59%	Efisien karena capaian kinerja berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan penyerapan anggaran yang tetap terkendali, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp44.247.690.
Meningkatnya lalu lintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas	148,36%	97,61%	Efisien karena capaian kinerja sangat tinggi dan melampaui target, sedangkan realisasi keuangan masih berada di bawah pagu anggaran sehingga menghasilkan efisiensi sebesar Rp24.628.708.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang telah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Seluruh sasaran strategis mampu mencapai bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, dengan realisasi anggaran yang tetap berada di bawah pagu yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dan anggaran telah dilakukan secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor perhubungan.

Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur, capaian kinerja sebesar 127,68% dengan capaian keuangan sebesar 82,93% menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai secara optimal tanpa harus menyerap seluruh anggaran yang tersedia. Dari pagu anggaran sebesar Rp6.044.665.100, realisasi anggaran sebesar Rp5.012.905.536, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp1.031.759.564. Efisiensi tersebut mencerminkan keberhasilan dalam pengendalian belanja dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan infrastruktur transportasi.

Pada sasaran Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan, capaian kinerja sebesar 116,67% dengan capaian keuangan sebesar 75,99% menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik. Dari pagu anggaran sebesar Rp4.010.310.000, terealisasi sebesar Rp3.047.426.834, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp962.883.166. Keberhasilan tersebut didukung oleh optimalisasi kegiatan pengadaan, pemasangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan perlengkapan jalan secara tepat sasaran.

Pada sasaran Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan, capaian kinerja sebesar 130,03% dengan capaian keuangan sebesar 95,59% menunjukkan bahwa program pelayanan angkutan berjalan efektif dan mampu memberikan hasil yang tinggi. Dari pagu anggaran sebesar Rp1.002.460.000, realisasi anggaran sebesar Rp958.212.310, sehingga menghasilkan efisiensi sebesar Rp44.247.690. Efisiensi ini

menunjukkan bahwa pengelolaan pelayanan transportasi, pengujian kendaraan bermotor, dan pengelolaan terminal telah dilaksanakan secara optimal.

Pada sasaran Meningkatnya lalu lintas yang berkeselamatan memperoleh capaian kinerja tertinggi yaitu sebesar 148,36% dengan capaian keuangan sebesar 97,61%. Dari pagu anggaran sebesar Rp1.031.895.100, terealisasi sebesar Rp1.007.266.392, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp24.628.708. Meskipun tingkat penyerapan anggaran cukup tinggi, sasaran ini tetap menunjukkan efisiensi karena capaian kinerja yang dihasilkan jauh melampaui target yang ditetapkan.

3.7 Lintas Sektor

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025 dilaksanakan melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah di bidang transportasi dan pelayanan publik. Kolaborasi lintas sektor dilakukan dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan/desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan transportasi, keselamatan lalu lintas, serta pengendalian mobilitas masyarakat.

Tabel 3. 16 Inventarisasi Lintas Sektor

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi PD/ Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji KIR) Sistem <i>Full Cycle</i>	Kementerian Perhubungan	Pembinaan teknis, integrasi sistem BLU-e dan penerapan layanan uji KIR <i>full cycle</i>	Terlaksananya pelayanan uji KIR terintegrasi mulai pendaftaran, pengujian, penerbitan bukti lulus uji, hingga pengawasan berbasis digital	Pemilik kendaraan angkutan umum dan barang	Meningkatkan kualitas pelayanan uji kendaraan, menjamin kendaraan laik jalan, mendukung keselamatan transportasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan
	Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas	Polres Rembang	Dukungan personel pengamanan dan rekayasa lalu lintas	Terlaksananya pengamanan lalu lintas terpadu	Pengguna jalan dan masyarakat umum	Meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas
	Dukungan Pengamanan Posko Angkutan	Polres Rembang dan TNI	Dukungan personel dan koordinasi lapangan	Terlaksananya posko terpadu angkutan hari besar	Pengguna transportasi	Meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi PD/ Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
	Lebaran dan Nataru					
	Pemasangan dan Pemeliharaan LPJU	PLN	Penyediaan jaringan dan sambungan listrik	Terpasangnya LPJU pada ruas jalan kabupaten	Masyarakat dan pengguna jalan	Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan
	Publikasi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan perhubungan melalui media informasi daerah	Informasi pelayanan	Masyarakat dan pengguna jalan	Meningkatkan akses informasi transportasi dan pelayanan publik
	Pengembangan Sistem Informasi dan CCTV Lalu Lintas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Dukungan jaringan komunikasi dan teknologi informasi	Terpasangnya sistem pemantauan lalu lintas berbasis teknologi	Dinas Perhubungan dan masyarakat	Mendukung pengawasan dan pengendalian lalu lintas secara efektif
	Program Mudik Gratis	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Rembang, Perusahaan Otobus	Bantuan armada dan dukungan operasional transportasi	Terselenggaranya pelayanan mudik gratis	Masyarakat umum Kabupaten Rembang	Memberikan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mendukung sasaran Pemda ” Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah” dengan indikator Indeks Infrastruktur maka Dinas Perhubungan mengampu Tujuan OPD yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur dengan indikator Indeks Konektivitas.
2. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur dengan indikator Indeks Konektivitas tahun 2025 adalah 127,68% dengan realisasi 79,48%.
3. Seluruh sasaran strategis mampu mencapai target kinerja dengan realisasi anggaran yang tetap berada di bawah pagu anggaran yang tersedia. Total efisiensi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025 mencapai Rp2.063.519.128.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang berkontribusi secara signifikan terhadap tercapainya sasaran strategis perangkat daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang yang mendukung peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas menjadi dasar dalam pelaksanaan program prioritas bidang perhubungan.
2. Adanya koordinasi dan sinergi antarbidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi.
3. Terjalannya kerja sama yang baik dengan instansi vertikal, aparat penegak hukum, perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung

pengendalian lalu lintas, penyelenggaraan angkutan, dan pelayanan transportasi.

4. Ketersediaan aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah secara profesional serta didukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan mendukung program pemerintah daerah di bidang transportasi turut berkontribusi terhadap terciptanya keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

4.2 Langkah Perbaikan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang di masa mendatang, Dinas Perhubungan perlu melakukan berbagai upaya perbaikan kinerja. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan tantangan dan peluang yang dihadapi.

1. Melakukan penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta indikator kinerja agar pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran, efektif, dan terukur.
2. Melakukan penentuan prioritas terhadap program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik, keselamatan lalu lintas, dan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah.
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui pengendalian belanja, efisiensi operasional kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar pelaksanaan program tetap berjalan optimal.
4. Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan disiplin kerja guna mendukung profesionalisme pelayanan.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar

perbaiki kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.

6. Melakukan peningkatan Infrastruktur dalam pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan (seperti rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan umum, dan fasilitas jalan lainnya).
7. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pengelolaan data, pelayanan publik, serta transparansi penyelenggaraan urusan perhubungan.
8. Meningkatkan pemeliharaan perlengkapan jalan, fasilitas keselamatan lalu lintas, dan penerangan jalan umum guna mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan.
9. Melaksanakan penataan manajemen lalu lintas secara berkelanjutan pada titik rawan kemacetan dan kecelakaan guna meningkatkan kelancaran arus kendaraan dan keselamatan transportasi.
10. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan/desa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengendalian lalu lintas dan penyelenggaraan transportasi.